

## MODEL *POLICY NETWORK* DALAM MENUNJANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN KUNINGAN

Ine Mariane<sup>1\*)</sup>, Aswin Palls<sup>2)</sup>, Andre Ariesmansyah<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*ine.mariane@unpas.ac.id*

<sup>2</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*aswin.palls@unpas.ac.id*

<sup>3</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*andre.ariesmansyah@unpas.ac.id*

### ABSTRAK

Permasalahan Pokok dalam Penelitian ini adalah belum terlaksananya model jejaring kebijakan sebagai fokus yang bukan hanya menuntut keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan hubungan saling menguntungkan di antara aktor dalam kerangka good governance; yaitu antara pemerintah dengan dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagai industri yang multidimensi dan lintas sektoral, serta memerlukan keterlibatan semua pihak agar mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Model Jejaring Kebijakan dalam menunjang kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan baik sektor ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki potensi pariwisata di berbagai bidang namun belum adanya pemahaman jejaring Kebijakan terkait fokus pembangunan daerah pariwisata yang berkelanjutan, Sehingga diperlukan komitmen pemerintah terhadap sektor pariwisata dengan menjadikan pariwisata sebagai fokus pembangunan, meluncurkan konsep *icon city branding*, meningkatkan jejaring kebijakan dan hubungan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, serta penyusunan *Master Plan* Kepariwisataaan, juga dukungan regulasi dalam pengembangan Sumber Daya yang dimiliki.

**Kata Kunci:** Jejaring Kebijakan (*Policy Network*), Pengembangan Pariwisata dan Pembangunan Berkelanjutan.

### ABSTRACT

*The main problem in this research is that the policy network model has not been implemented as a focus that not only requires the involvement of actors as participants, but also mutually beneficial relationships between actors in the framework of good governance; namely between the government and the business world, and the community in the development of tourism as a multidimensional and cross-sectoral industry, and requires the involvement of all parties in order to achieve sustainable tourism development. This study aims to determine the Policy Network Model in supporting sustainable tourism policies in Kuningan Regency, both in the economic, environmental and socio-cultural sectors. The research design used a qualitative approach, with a phenomenological method. The results of the study can be explained that Kuningan Regency has tourism potential in various fields but there is no understanding of policy networks related to the focus of sustainable tourism regional development, so that the government's commitment to the tourism sector is needed by making tourism the focus of development, launching the concept of city branding icons, increasing policy networks. and communication and coordination relations between institutions in tourism management, as well as the preparation of the Tourism Master Plan, as well as regulatory support in developing the resources owned.*

**Keywords:** *Policy Network, Tourism Development and Sustainable Development.*



## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Kuningan menjalankan Kebijakan Pengembangan Pariwisata berkelanjutan yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisata. Secara umum kebijakan ini dimaksudkan untuk pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata. Keberhasilan pengembangan pariwisata tidak bisa diukur dari pembangunan fisik saja, melainkan untuk meningkatkan efektifitas dalam pengembangan pariwisata perlu tindakan yang menyeluruh, pengembangan harus dilakukan pada segala aspek yang berkaitan dan berpengaruh pada pariwisata. Beberapa tindakan dalam pengembangan pariwisata antara lain revitalisasi fisik, pengembangan pengelolaan pasar, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan proteksi terhadap sumber alam langka. Keberhasilan pengembangan pariwisata tidak dapat diperoleh hanya dengan memaksimalkan satu tindakan, melainkan harus dilakukan secara berimbang.

Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensinya, oleh karenanya kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral, keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu (Brawnwel dalam Theobald (ed), 2005: 406).

Salah satu stakeholders yang memiliki peranan penting adalah pemahaman baik dari pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan semua perencanaan pariwisata secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah tentu akan menaruh perhatian dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata tersebut akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan (Wanhill, dalam Theobald, 2005). Di sisi lain, pelaku bisnis yang lebih berorientasi pada keuntungan tentu tidak bisa mengatur apa yang harus dilakukannya, tetapi pemerintah bisa mengatur apa yang tidak boleh mereka lakukan melalui kebijakan dan regulasi. Misalnya dengan menetapkan peraturan tata ruang, perijinan, lisensi, akreditasi, dan perundang-undangan. Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan incentive dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, seperti; aturan pemanfaatan lahan, membatasi akses wisatawan terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap kerusakan, melindungi budaya lokal, mengarahkan perilaku wisatawan yang berwawasan lingkungan, pembatasan dalam penggunaan energi, menghemat sumber alam yang langka, mengurangi polusi dan memberikan insentif terhadap pembangunan infrastruktur yang juga bermanfaat bagi host seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap ruang hijau kota dan *national park*.

Pemilihan terhadap instrumen kebijakan akan sangat menentukan apabila didasarkan kepada kajian yang utuh terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan cara seefisien mungkin, tidak didasarkan pada kajian yang parsial dan tidak menyeluruh. Hal terpenting juga perlu didasari oleh moral dan kemauan politik yang baik. Isu-isu yang berkembang saat ini mengenai perencanaan pariwisata hanya lebih menekankan aspek teknis saja padahal sebenarnya merupakan masalah politik yang menyangkut regulasi terhadap semua komponen pariwisata yang ada dalam rangka menuju pariwisata berkelanjutan (Theobald, 2005).



Penelitian yang terkait dengan jejaring kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan, hasil penelitian Saiful Ulum, et al mengemukakan bahwa Dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo Kecamatan Sidayu, terdapat tiga aktor pembangunan yang berperan dalam mewujudkan kebijakan Minapolitan yang sustainable development, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Sejauh ini pemerintah menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator dan permodalan. Dalam menjalankan perannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pemerintah mendasarkan pada prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang disampaikan oleh Budimanta (2005, h.7) yaitu, (1) Cara berpikir yang integratif; (2) Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang; (3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati; dan (4) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui kegiatan survei sebelum mengeluarkan kebijakan dan menetapkan Desa Srowo sebagai kawasan minapolis tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, hasil penelitian Sunaryo mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam perspektif pembangunan berkelanjutan memiliki peluang berkembang untuk dilaksanakan. Seiring dengan diwajibkannya secara hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR dan kesadaran konsumen, maka akan semakin banyak perusahaan peduli pada pelestarian lingkungan.

Di samping itu, dengan otonomi daerah akan memberi peluang tercapainya kualitas keputusan menjadi lebih baik, karena pihak-pihak yang berkompeten turut dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan salah satu syarat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yakni partisipatori, demokrasi, dan kesempatan menentukan nasib sendiri. Lebih lanjut dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Perusahaan yang ingin mencapai corporate sustainability dituntut memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Program-program CSR dimaksud adalah program-program yang senantiasa berorientasi pada Dasa karya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sebagai pedoman strategis Kesepuluh upaya tersebut (DPLH) merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan harus dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat luas, maupun dunia usaha. Dengan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, maka akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya.

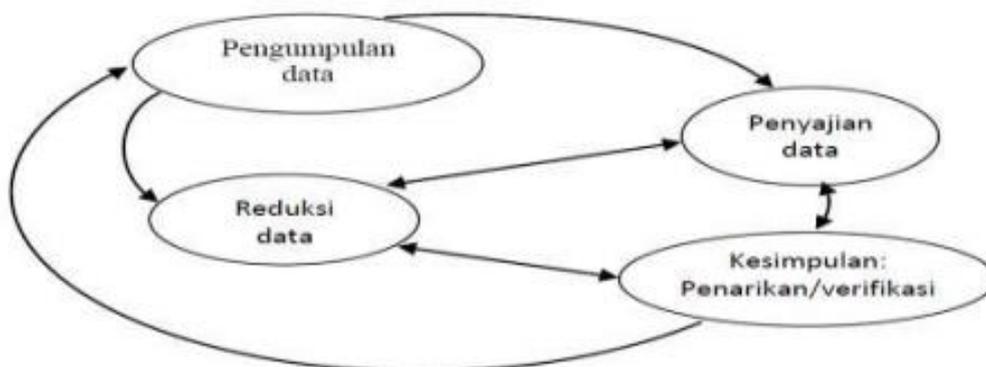
Permasalahan Pokok dalam Penelitian ini adalah bahwa di kabupaten Kuningan belum terlaksananya model jejaring kebijakan sebagai fokus kegiatan yang bukan hanya menuntut keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan hubungan saling menguntungkan di antara aktor dalam kerangka good governance antara pemerintah dengan dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagai industri yang multidimensi dan lintas sektoral, serta memerlukan keterlibatan semua pihak agar mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Peran policy maker sangat penting dalam menentukan kebijakan pariwisata yang akan diambil untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Selama ini perencanaan pembangunan masih tertuang secara parsial dalam setiap sektor sub kegiatan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga diadopsi sebagai visi pembangunan pariwisata Kabupaten Kuningan, yaitu “Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Pertanian, Wisata, Budaya Lokal Untuk Mempercepat Pertumbuhan serta Pemerataan Ekonomi Rakyat” Pembangunan dilakukan secara legal dan mengadopsi pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah kebijakan pembangunan, tetapi dalam perkembangannya regulasi maupun indikator formal dan holistik yang dapat diadopsi dan dijadikan pedoman dalam menilai keberhasilan pembangunan tidak tersedia dengan lengkap.

Kebijakan pariwisata berkelanjutan yang holistik belum dapat diimplementasikan secara konkrit dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Kuningan, sehingga penelitian ini akan mengupas Model Jejaring Kebijakan dalam menunjang implementasi kebijakan kebijakan pariwisata di Kabupaten Kuningan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif, Subjek penelitian yaitu Kepala Dinas, pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), serta masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata Kabupaten Kuningan. Data diperoleh dari Data Primer hasil wawancara langsung kepada seluruh informan, dan Data Sekunder berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pengelolaan Pariwisata, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, dan data –data di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) terkait Data destinasi pariwisata Kabupaten Kuningan

Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan namun berhubungan dengan data – data yang diperlukan, dan Observasi yaitu pengamatan dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait wujud jejaring kebijakan, yaitu kegiatan komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan masing-masing aktor dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan, serta dokumentasi perolehan data yang berasal dari dokumen-dokumen, baik tertulis atau terekam, terkait dengan objek penelitian. Untuk mengecek keabsahan dan kredibilitas data, menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber informasi yang berbeda sehingga peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid terkait Jejaring Kebijakan. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari hasil interpretasi data agar mudah dipahami. Analisis data penelitian ini, bila dinyatakan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Komponen Analisis data (Miles dan Huberman, 2007: 20)

## PEMBAHASAN

Kabupaten Kuningan memiliki banyak sekali potensi pariwisata di berbagai bidang yang tersebar di beberapa lokasi. Berdasarkan hasil analisa dan pantauan pada saat penelitian, peneliti menemukan beberapa penyebab belum optimalnya sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan terutama dalam hal kontribusinya terhadap pengembangan berkelanjutan, antara lain:



1. Belum adanya kawasan strategis, Pariwisata di Kabupaten Kuningan belum dikembangkan secara fokus. Kabupaten Kuningan memiliki banyak sekali potensi wisata yang tersebar di banyak titik, namun demikian pemerintah kabupaten Kuningan harus bisa menetapkan salah satu kawasan strategis pariwisata unggulan yang akan menjadi fokus dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan sekaligus dijadikan sebagai *icon* pariwisata daerah.
2. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kuningan dilaksanakan secara teknis oleh dua lembaga/ instansi yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Sejauh ini antara kedua lembaga lebih fokus terhadap pengelolaan destinasi wisata yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing padahal potensi kedua lembaga ini akan lebih optimal apabila disinergiskan dan dikolaborasikan. Diperlukan kerjasama dengan mengesampingkan ego kelembangaan demi mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada.
3. Komitmen pemerintah yang belum optimal terhadap pengembangan pariwisata, terbukti dengan alokasi anggaran pengembangan potensi wisata yang masih sangat terbatas dan pariwisata belum menjadi icon utama dalam rencana pembangunan.
4. Belum adanya *master plan* kepariwisataan sebagai acuan dalam pelaksanaan pariwisata yang terarah dan berkelanjutan
5. Belum optimalnya kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata

Berdasarkan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan terdapat Strategi dan Arah Kebijakan Kepariwisata sebagai berikut:

- a. Pengembangan Industri pariwisata berdaya saing, melalui:
  - 1) Penguatan industri pariwisata dan keterkaitan antara industri pariwisata dan industri kreatif, termasuk dengan usaha mikro, kecil dan menengah
  - 2) Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi investasi pariwisata Pengembangan UMKM serta industri kreatif bidang pariwisata
  - 3) Penerapan Standard Operating
  - 4) Procedure (SOP) usaha pariwisata
  - 5) Penerapan sertifikasi kompetensi pariwisata dan usahapariwisata dan penerapan sapta pesona pariwisata di destinasi pariwisata
  - 6) Peningkatan Koordinasi dan kerjasam lintas sektoral
  - 7) Peningkatan promosi pariwisata
- b. Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, melalui:
  - 1) Peningkatan konsolidasi akses transportasi terutama antar pemerintah daerah perbatasan yang tergabung dalam KUNCI BERSAMA
  - 2) Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata serta meningkatkan kualitas dan standar pelayanan minimum pariwisata Penataan dan diversifikasi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan termasuk event dan olah raga
  - 3) Pengembangan destinasi pariwisata di daerah terdepan, terluar dan wilayah perbatasan, Pengembangan agropilitan yang merupakan konsepsi pengembangan wilayah berbasis pedesaan tempat sumber daya pertanian dengan cara mengadaptasikan elemen-elemen pertanian modern dengan meningkatkan akses jaringan ekonomi (pariwisata) regional yang lebih luas
  - 4) Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan



- 5) Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas stakeholder pengembangan daya tarik wisata
- 6) Penataan kebijakan dana manajemen daya tarik wisata dan produk pariwisata
- 7) Pemanfaatan media cetak, elektronik, dan public figure dan media kesenian tradisional
- 8) Pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi
- 9) Peningkatan efektivitas pengelolaan destinasi pariwisata melalui peningkatan koordinasi dan ketrepaduan pembangunan pariwisata dan Destination Management Organization (DMO)
- 10) Pengembangan destinasi pariwisata dengan meningkatkan apresiasi seni dan budaya lokal.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan, terdapat beberapa potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan yang memiliki kelebihan dalam hal kekayaan alam seperti udara yang sejuk, air yang segar dan melimpah, tanah yang subur, serta konservasi yang terletak di sekitar Gunung Ciremai sebagai Gunung tertinggi di Jawa Barat dan menjadi ciri khas dari Kuningan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait bidang kepariwisataan terdiri dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta visi misi kabupaten Kuningan, yaitu “Kuningan MAS (Mandiri, Agamis, Sejahtera) tahun 2018 – 2023”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi yang berkaitan dengan pariwisata daerah adalah memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah dan sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana pariwisata daerah. Arah kebijakan bidang pariwisata adalah peningkatan kualitas sarana prasarana objek wisata, peningkatan promosi pariwisata daerah dan peningkatan kemitraan / jejaring pariwisata.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan tentang kepariwisataan secara teknis juga telah dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Visi kepariwisataan Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yaitu “Mewujudkan Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera melalui pariwisata yang maju, unggul berbasis budaya dan alam yang lestari tahun 2018- 2023”. tetapi dalam perkembangannya regulasi maupun indikator formal dan holistik yang dapat diadopsi dan dijadikan pedoman dalam menilai keberhasilan pembangunan tidak tersedia dengan lengkap.

Perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata selama ini perencanaan pembangunan masih tertuang secara parsial dalam setiap sektor sub kegiatan , sehingga pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan yang digambarkan dengan adanya perbedaan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan Kabupaten Kuningan belum terlaksananya Jejaring Kebijakan sebagai fokus yang bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan di antara partisipan atau aktor dalam kerangka good governance, baik antara pemerintah dengan dunia usaha, dan masyarakat.

Kabupaten Kuningan untuk kemajuan industri pariwisatanya diperlukan kebijakan yang holistik, dimana Kebijakan pariwisata merupakan kebijakan strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata sebagai industri yang multidimensi dan lintas sektoral yang memerlukan semua pihak agar mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan, dalam hal ini adalah Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang memiliki perannya masing – masing, dimana pemerintah sebagai regulator bisa mengatur apa yang tidak boleh mereka lakukan melalui kebijakan dan regulasi ,serta fasilitator dan permodalan, sedangkan Dunia Usaha membantu memberi nilai tambah melalui investasi dalam revitalisasi fisik, maupun *corporate social responsibility* (csr), dan masyarakat agar

memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif tentang kebijakan pariwisata dengan menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek sejarah, dan nilai-nilai tradisi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kuningan belum memiliki komitmen untuk mensinergikan berbagai kepentingan antar sektor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Industri pariwisata akan berlangsung tatkala ada sejumlah rangsangan yang menarik, kemudahan perijinan, kepastian usaha, promosi dan sebagainya. Pemerintah juga perlu melakukan perlindungan dan proteksi yang ketat terhadap industri pariwisata, mengingat pariwisata sangat rentan terhadap berbagai kerusakan lingkungan, tinggalan arkeologi, kesehatan, wabah penyakit dan sebagainya. Pengembangan pariwisata yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, secara Lintas sektor pada jejaring kebijakan dan merupakan bagian yang penting dalam prakteknya perlu dukungan CSR dari sektor *private* (dunia Usaha) untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata. Selain itu dengan memberikan peluang pengusaha lokal untuk berinvestasi dalam berbagai industri pariwisata, sehingga dengan keterlibatan ini akan menunjukkan sensitivitas efek pengembangan pariwisata terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kuningan bersama dunia usaha perlu melibatkan masyarakat agar memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif tentang kebijakan pariwisata melalui Program Bina Lingkungan, yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, serta semua kegiatan merupakan usaha peningkatan citra destinasi wisata. Kabupaten Kuningan belum melakukan Komunikasi dan kordinasi yang baik kepada ketiga Aktor Pelaku Program sebagai Tripilar, baik yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi terkait lainnya, sehingga diperlukan hal tersebut untuk mendukung efektivitas Jejaring Kebijakan dalam pengembangan pariwisata.

Kabupaten Kuningan belum melaksanakan Prinsip *network governance*; dimana pemerintah, masyarakat dan dunia usaha memiliki jaringan dan interaksi yang sinergik untuk mengimplementasikan kebijakan Pariwisata, melalui kepemimpinan yang inovatif dan memiliki visi yang jelas, memperhatikan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, adanya kepercayaan, komitmen, sumberdaya, aturan, kepentingan publik serta pemerataan kesempatan. Berdasarkan pengamatan dan hasil analisa peneliti menemukan kebaruan (*novelty*) tentang model *policy network* dalam menunjang implementasi kebijakan pariwisata di kabupaten kuningan sebagai strategi Pengembangan Pariwisata berkelanjutan yang dapat dikembangkan, yaitu:

- 1) Membuat kebijakan yang holistik, dimana Kebijakan pariwisata merupakan kebijakan strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata sebagai industri yang multidimensi dan lintas sektoral yang memerlukan semua pihak agar mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan, untuk membuat sebuah kawasan unggulan destinasi wisata yang akan dikembangkan secara fokus. Penentuan kawasan unggulan destinasi wisata harus dengan pertimbangan *multiflyer effect* secara ekonomi, seperti yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 tahun 2013 bahwa salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa kawasan strategis yang tepat untuk dijadikan kawasan unggulan destinasi wisata Kabupaten Kuningan adalah Kecamatan Cigugur. Kecamatan Cigugur dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata alam (pendakian gunung curemai, perkemahan, dll), wisata sejarah dan Wisata Budaya (Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Gua Maria). Selain itu juga dapat dikembangkan konsep

- agrowisata dengan wisata kebun strawberry, wisata pemerahan susu dan aneka produk olahannya serta pengembangan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti villa, dll.
- 2) Komitmen untuk mensinergikan berbagai kepentingan antar sektor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah terhadap sektor pariwisata dengan menjadikan pariwisata sebagai fokus pembangunan daerah sehingga semua kebijakan dari berbagai instansi pemerintah akan mengacu pada kegiatan pengembangan pariwisata
  - 3) Meningkatkan Prinsip *network governance*; dimana pemerintah, masyarakat dan dunia usaha memiliki jaringan dan interaksi yang sinergik untuk mengimplementasikan kebijakan Pariwisata, melalui kepemimpinan yang inovatif dan memiliki visi yang jelas, memperhatikan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, adanya kepercayaan, komitmen, sumberdaya, aturan, kepentingan publik serta pemerataan kesempatan. Melalui jejaring kebijakan hubungan antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, misal di wilayah internal Kabupaten Kuningan pemerintah dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi melalui jejaring kebijakan yang optimal dalam pengelolaan pariwisata daerah, yaitu antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), dan juga masyarakat pegiat usaha pariwisata. Misalkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan lebih memfokuskan terhadap penyediaan dan support infrastruktur Penunjang Pariwisata sementara PDAU lebih fokus terhadap strategi bisnis dan promosi kepariwisataan, dengan dibantu oleh pegiat usaha pariwisata akan menjadi jejaring kebijakan yang berkolaborasi optimal, ini tentu akan dapat mengoptimalkan sektor pariwisata daerah terutama kontribusinya
  - 4) Selain itu, pengembangan sektor kepariwisataan harus ditunjang dengan Komunikasi dan kordinasi yang baik kepada ketiga Aktor Pelaku Program sebagai Tripilar, adanya dukungan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Misalkan dengan penyusunan *Master Plan* Kepariwisataan sebagai bagian integral yang memuat tentang pokok dan tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Daerah, serta menyusun manajerial yang terpadu dan profesional di setiap objek wisata.
  - 5) Meluncurkan Konsep *City Branding* sebagai icon pariwisata yang khas, *City branding* dapat dikembangkan dalam rangka optimalisasi promosi pariwisata daerah. *City Branding* merupakan strategi dari suatu kota atau wilayah untuk membuat positioning yang kuat di dalam benak target pasar mereka, seperti layaknya positioning sebuah produk atau jasa, sehingga kota dapat dikenal secara luas baik regional ataupun global.

## KESIMPULAN

Kabupaten Kuningan sebagai daerah konservasi dan sejarah, serta kondisi alam yang kaya akan potensi pariwisata merupakan sektor utama yang harus dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Kuningan harus memiliki model *policy network* dalam menunjang implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Kuningan, dimana dibutuhkan pemahaman bagi *policy maker* tentang Model Jejaring Kebijakan sebagai fokus yang bukan hanya menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan di antara partisipan atau aktor dalam kerangka *good governance*.

Kawasan unggulan destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan dan pertimbangan *multiflyer effect* secara ekonomi, Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan adalah membentuk model jejaring kebijakan yang memiliki komitmen bersama dari semua aktor, meningkatkan peran serta fungsinya dalam

pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kuningan, pemerintah memiliki fokus pembangunan pariwisata daerah, meluncurkan konsep *City branding* sebagai ikon pariwisata yang khas, meningkatkan hubungan saling menguntungkan dalam kemitraan, komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, juga dukungan regulasi dalam pengembangan Sumber Daya yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2010), *Research Design: Pendekatan Kualitatif dalam Perspektif*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Elkington, John (1998), *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers
- Elliot, Doren. "Social Work and social Development: Toward an Integrative Model for Social Work Practice". International Social Work. 1993.
- Fox, T., Ward, H., Howard, B. (2002). *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study*. The World Bank.
- Gunawan, Alex, 2008, *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*, buku online.
- Junaidi, Muhammad, 2013, *Korporasi Dan Pembangunan Berkelanjutan*, Alfabeta, Bandung.
- Kenny, Susan, 2007, *Developing Communities for The Future*, Thompson, South Melbourne
- Komara, Eko, 2013, *Menakar CSR (Memetakan Potensi Pendanaan CSR Dan Peluang Kolaborasi Dengan CSO)*, HIVOS, IBCSD, Jembatan Tiga, Penabulu Alliance.
- Kotler, Phillip &, Nancy, 2005, *Corporate Social Responsibility, Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley & Son, New Jersey.
- Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Salemba Biru, Yogyakarta
- Marind B and Renate Mayntz. 1991. *Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations*,
- Moleong, Lexy J, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Norhadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Semarang
- Noveria, Mita, 2011, *Pertumbuhan Penduduk Dan kesejahteraan*, LIPI Press, Jakarta
- O'Rourke, D. (2004). *Opportunities and Obstacles for Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries*. The World Bank and International Finance Corporation. OECD, 2004, *OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publication Service.
- Payne, Malcolm, (2005), *Modern Social Work Theory*, Palgrave Macmillan, New York.
- Rudito Bambang, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung
- Rubin, Herbert J, and Rubin, Irene S (2000), *Community Organizing and Development*, Allyn and Bacon, Massachusetts
- Siporin, M., 1975, *Introduction to Social Work Practice*, Mac Millan, New York.
- Soedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Mandar Maju, Bandung
- Straussner, Shulamith Lala Ahenberg, 1989, *Occupational Social Work Today, An Overview*, The Haworth Press, New York
- Steurer, R. (2009). The role of governments in corporate social responsibility: characterising public policies on CSR in Europe. *Springer Science+Business Media, LLC*. Suharto, Edi, (2009), *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, Alfabeta, Bandung



- ..., (2010), *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Ign 2010, *Program Community Development Dan Peningkatan Kesejahteraan*, Unpad Pres, Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat; Kumpulan esai Tentang Penanggulangan Kemiskinan*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Sunyoto Usman, 1998, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suhartini, et. Al, 2005, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, LkiS Pelita Aksara, Yogyakarta.
- Wahyudi, Isa et.al, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan & Implementasi*, Setara Press & Inspire, Malang

